

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESA (SAPDesa) PADA KANTOR DESA JELBUK
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

Alfin Desta Audyarizky Supriyono
NIM : 204105030112

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESA (SAPDesa) PADA KANTOR DESA JELBUK
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Alfin Desta Audyarizky Supriyono

NIM : 204105030112

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M

NIP. 197107272002121003

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESA (SAPDesa) PADA KANTOR DESA JELBUK
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Selasa
Tanggal : 01 Oktober 2024

Tim Penguji



Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Hj. Nurul Widawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.
NIP: 197509052005012003


Nur Hidayat, S.E., M.M.
NIP: 197905052023211015

Anggota :

1. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M., CRMP. 
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., CPE. 

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP: 196812261996030011

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT. Atas kelancaran, kesehatan, dan rezeki yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat berterima kasih kepada orang-orang terdekat yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini di dedikasikan kepada :

1. Orang tua saya, terima kasih kepada Mama, Busriyati dan Papa, Hadi Supriyono yang telah memberikan dukungan moril maupun materi agar saya mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari kalian. Skripsi ini adalah bentuk penghargaan dan penghormatan yang bisa saya berikan atas selesainya saya di bangku pendidikan Strata 1. Terima kasih atas doa kalian yang tak henti-hentinya kalian panjatkan agar saya selalu berada dalam lindungan-Nya di mana pun saya berada.
2. Saudari kandung saya Feby Dwi Gita Putri Supriyono yang selalu mendukung dan mengingatkan untuk melanjutkan skripsi ini hingga selesai.
3. Sahabat-sahabat saya Hanifah Nur Azizah dan Dian Astarini Saputri yang telah kebersamai saya selama delapan tahun ini. Terima kasih atas dukungan dan semangat kalian. Saya tahu kehidupan kalian tidak mudah, tapi, terima kasih telah menerima dan mendengarkan keluh kesah saya sebagai teman kalian. Saya bersyukur ada kalian dihidup saya yang monoton ini.
4. Teman-teman yang saya kenal sejak masuk di bangku perkuliahan, Irma Miskah Hidayati, Lisa Dwi Putri dan Nabila Balqis, yang kostannya selalu menjadi tempat saya singgah saat jeda perkuliahan. Terimakasih atas bantuan,

dukungan, dan inspirasinya. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik di mana pun kalian berada.

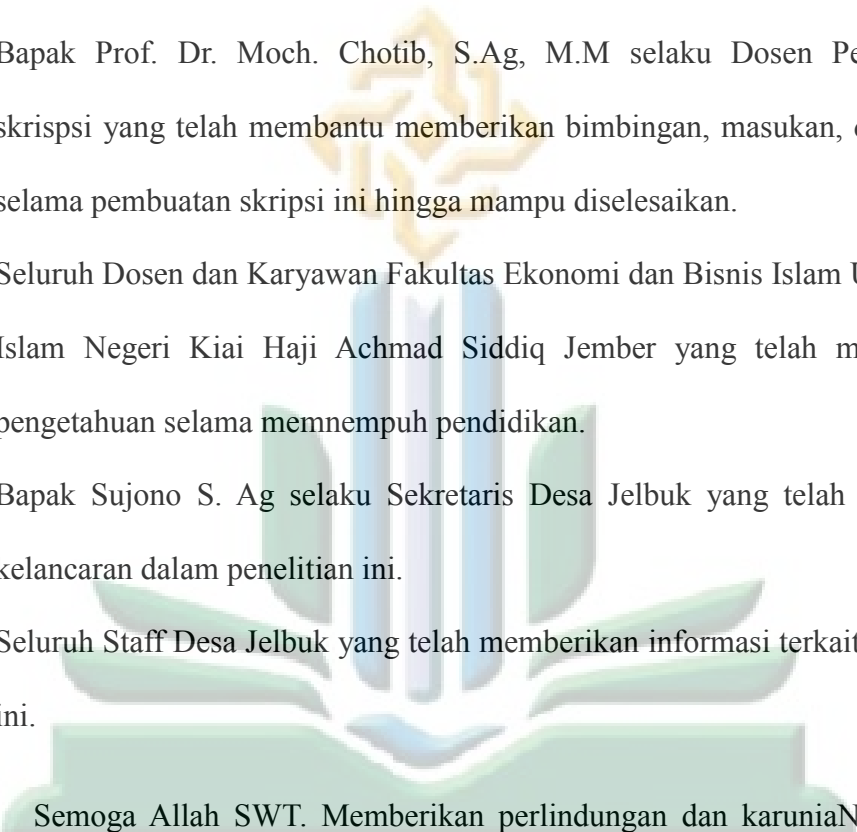
5. Semua pihak yang telah bertanya “Kapan sidang?”, “Kapan wisuda?”, “Kapan nyusul?”, kalian adalah salah satu semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga setelah ini tidak ada lagi pertanyaan “kapan” yang harus selalu saya hadapi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAPDesa) Pada Kantor Desa Jelbuk Kabupaten Jember”. Skripsi ini dibuat untuk mendapat salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan studi Akuntansi Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Namun, atas pertolongan Allah SWT. Dan dukungan dari seluruh pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak. selaku koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M. Si. selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- 
6. Bapak Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama pembuatan skripsi ini hingga mampu diselesaikan.
 7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan selama memnempuh pendidikan.
 8. Bapak Sujono S. Ag selaku Sekretaris Desa Jelbuk yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini.
 9. Seluruh Staff Desa Jelbuk yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.

Semoga Allah SWT. Memberikan perlindungan dan karuniaNya kepada kita semua yang telah membantu sampai skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembacanya.

Jember, 11 Juli 2024
Penulis

Alfin Desta A.S
204105030112

ABSTRAK

Alfin Desta Audyarizky Supriyono, Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M 2024
: *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) Pada Kantor Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, SAPDesa, *Good Corporate Governance*

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemegang amanat atas apa yang telah dipercayakan kepadanya kepada seluruh pihak yang menjadi hak dan kewenangannya. Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran akan informasi keuangan yang didasarkan pada hak untuk mengetahui secara menyeluruh oleh masyarakat mengenai pertanggungjawaban atas amanat yang telah diembannya serta kepatuhan terhadap perundang-undangan. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur pencatatan, pelaporan dan pengelolaan keuangan desa. *Good Corporate Governance* adalah sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja optimal perusahaan tanpa merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan baik sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah 1) Bagaimana perencanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk? 2) Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Jelbuk Jalan Raden Ajeng Kartini No.6, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Teknik penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dan menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1) Desa Jelbuk belum melakukan penyajian laporan keuangan sesuai PSAP 1. 2) Desa Jelbuk telah menerapkan 4 (empat) asas akuntansi. 3) Sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih kurang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	25
1. Akuntansi Pemerintahan	25
2. Akuntansi Sektor Publik	27

3. Pemerintahan Desa.....	29
4. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)	33
5. Good Corporate Governance.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap- Tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis	59
1. Perencanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk	59
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk	64
C. Pembahasan Temuan	68
1. Perencanaan Standar Auntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk	68
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk	70

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	65
1. Matrik Penelitian	
2. Surat pernyataan keaslian tulisan	
3. Laporan Keuangan Desa Jelbuk	
4. Pedoman wawancara	
5. Surat izin penelitian	
6. Surat keterangan selesai penelitian	
7. Jurnal kegiatan penelitian	
8. Dokumentasi penelitian	
9. Surat keterangan screening turnitin	
10. Surat keterangan selesai bimbingan	
11. Biodata penulis	

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	21
4.1 Batas Wilayah Desa Jelbuk	49




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

4.1 Laporan Realisasi Anggaran Kantor Desa Jelbuk	57
4.2 Laporan Realisasi Anggaran Kantor Desa Jelbuk	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia, sebagai negara kepulauan, terdiri dari beberapa provinsi, yang selanjutnya dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap kabupaten memiliki kepala pemerintah daerah dan berbagai pejabat pengawas. Otonomi daerah memberikan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab suatu daerah untuk mengatur diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan keistimewaan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Mereka harus bertanggung jawab penuh kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

Tingkat kemiskinan yang tinggi yang terus-menerus terus menantang upaya pembangunan sosial. Sebagai tanggapan, pemerintah bekerja untuk membuat dan melaksanakan strategi pembangunan nasional yang dirancang untuk mengatasi rendahnya tingkat pembangunan, terutama berfokus pada desa. Pembangunan desa merupakan pendekatan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah, selaras dengan tujuan pemerintah pusat dan daerah. Strategi ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan yang merata dan berdampak langsung pada kepentingan desa, dengan tujuan mengurangi kemiskinan di masyarakat pedesaan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dalam bentuk moneter, termasuk uang dan barang yang

dapat digunakan sebagai milik negara sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Pemerintah yang mencakup pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara secara tertib. Pengelolaan ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan, dan dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan keadilan dan kepatuhan.¹

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP disajikan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), disertai dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah dan dikembangkan sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. SAP berfungsi sebagai acuan penyusunan laporan keuangan baik untuk Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.² Permendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) mendefinisikan Akrua Basis sebagai pendekatan akuntansi yang mengakui dampak transaksi dan peristiwa pada saat terjadi, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima atau dicairkan. SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam APBN/DAERAH. Pembaruan SAP bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif untuk (1) mengevaluasi akuntabilitas manajemen

¹ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara'.

² Standar Akuntansi Pemerintahan, - Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

sumber daya, (2) menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas, dan (3) mendukung pengambilan keputusan.³

Pengelolaan keuangan desa tetap menjadi topik krusial dan masih aktif dibahas hingga saat ini karena berbagai kendala yang sering ditemui selama pelaksanaannya. Memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan sangat penting untuk menggunakan dana desa secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya pembangunan harus selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang mengatur Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa dialokasikan anggaran dari APBN sebesar minimal 10 persen dari dana saldo kabupaten/kota dari APBD. Pendanaan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan desa. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan bagi pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Anggaran ini digunakan pemerintah untuk memandu pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran tersebut diperlukan karena kebutuhan masyarakat tidak terbatas. Program dan kegiatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁴

³ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) Edisi Kedua*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017). h. 105

⁴ 'PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [JDIH BPK RI]'.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, disusun dan disetujui secara kolaboratif oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta diresmikan melalui peraturan daerah. Pendanaan untuk urusan pemerintahan di bawah kewenangan daerah bersumber dari dan dikelola melalui APBD.⁵

Pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa. Kegunaan laporan keuangan adalah untuk menghitung laba, menyediakan informasi tentang ekuitas, serta menjaga keseimbangan dalam laporan.⁶ Untuk memastikan akuntabilitas keuangan desa yang tepat, laporan keuangan pemerintah desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa). SAPDesa dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), sebuah badan independen yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah dengan masukan dari Badan Audit Keuangan. Penyusunan SAPDesa mengikuti proses standar (*due process*) yang dikelola oleh KSAP, yang mencerminkan akuntabilitas profesional komite. Penyusunan SAPDesa dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang saat ini menjadi signifikan setelah adanya dana desa. Kebutuhan inilah yang ditangkap pada Rapat Pleno KSAP dengan Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah melalui *High Level Meeting* lintas

⁵ Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan* (Bogor: In Media, 2017).

⁶ Senator Iven Budiarto, Nur Ika Mauliyah, 'Pengaruh Tingkat Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kuliner Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi', *Seminar Inovasi Majemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun*, Vol 3 (2021).

kementerian, sebagai tindak lanjut Rapat dengan Komite Konsultatif, KSAP sebagai *standard setter* dipercaya untuk mengemban amanah sebagai penyusun SAPDesa.⁷

Akuntansi desa melibatkan pencatatan proses transaksi yang terjadi di dalam desa, sebagaimana dibuktikan dengan nota. Hal ini diikuti dengan pencatatan dan pelaporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang disajikan sebagai laporan keuangan, yang digunakan oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan desa.⁸ Pelaporan keuangan tingkat desa merupakan sarana untuk memastikan transparansi, melengkapi persyaratan akuntabilitas dengan menunjukkan keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa juga disebut dengan nama lain atau sebagai unit adat, adalah satuan masyarakat yang sah dengan batas-batas teritorial yang ditentukan. Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak adat, dan/atau hak asal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mengelola urusan ini dan menangani kepentingan masyarakat lokal dalam sistem ini. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang juga dikenal dengan gelar lain yang didukung oleh aparatur Desa sebagai bagian dari struktur administrasi. Badan

⁷ Standar Akuntansi Pemerintahan Desa – Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

⁸ Marlina, dan Muchamad Choirul Anam, 'Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung', *Jurnal of Accounting and Tax*, Vol 1 No. 2 (2022). 97.

Permasyarakatan Desa atau dikenal dengan nama lain adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan dan terdiri dari perwakilan yang dipilih dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan daerah melalui proses demokrasi. Peraturan Desa adalah peraturan dan peraturan yang diundangkan oleh Kepala Desa setelah berdiskusi dan disepakati dengan Badan Permasyarakatan Desa. Pembangunan Desa mengacu pada upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa secara keseluruhan. Keuangan Desa mencakup semua hak dan kewajiban keuangan Desa, termasuk aset dan sumber daya moneter yang terkait dengan pemenuhan hak dan tanggung jawab tersebut.⁹

Desa Jelbuk adalah salah satu desa di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember yang di pimpin oleh Kepala Desa dan di bantu oleh staf desa yang berjumlah 15 orang dalam menjalankan pemerintahan desa. Lokasi kantor desa yang strategis dan terletak di pinggir jalan provinsi berdekatan dengan kantor kecamatan desa Jelbuk. Di samping kanan dan kiri kantor desa Jelbuk adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Jelbuk dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Jelbuk serta Pasar.

Pada tahun 2022, Kecamatan Jelbuk memiliki 3 fasilitas lembaga keuangan berupa bank. Fasilitas tersebut meliputi 1 bank umum milik pemerintah dan 2 unit bank perkreditan rakyat. Selain itu, di Kecamatan Jelbuk juga terdapat 4 koperasi aktif, yang sebagian besar adalah koperasi simpan pinjam (Kospin). Namun, koperasi unit desa (KUD), koperasi industri

⁹ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [JDIH BPK RI]’.

kecil dan kerajinan, serta koperasi lain selain simpan pinjam, tidak tersedia di Kecamatan Jelbuk. Untuk sarana perdagangan, hanya ada satu pasar di Desa Jelbuk, yaitu Pasar Jelbuk, yang memiliki bangunan permanen.¹⁰

Fenomena yang terjadi berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh penulis, sejak terpilihnya Kepala Desa saat ini, segmen masyarakat telah menyatakan keprihatinan tentang apakah akuntabilitas keuangan desa dikelola sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa). Penulis ingin melakukan penelitian di Desa Jelbuk berdasarkan fenomena tersebut. Dan juga pada saat dilakukan perbandingan dalam penentuan objek penelitian, Desa Jelbuk merupakan Desa yang menarik diteliti karena dibandingkan desa lainnya, segala pusat pemerintahan berada di Desa Jelbuk seperti letak Kantor Kecamatan Jelbuk, Pasar Desa Jelbuk, Koperasi Simpan Pinjam, dan Lembaga Keuangan yang berada di Desa Jelbuk. Menurut observasi yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti pada kantor desa Jelbuk tentang perencanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa, sejauh ini terjadi beberapa ketidaksesuaian pada perancangan proyek irigasi. Pada saat melakukan perancangan proyek irigasi yaitu satu tahun sebelum diterapkan, harga perkiraan material proyek irigasi tidak sesuai dengan harga pasar pada saat ini. Akibatnya, material yang dipilih harus sesuai harga dan kualitas yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan pada saat perencanaan.

¹⁰ Tim BPS Kabupaten Jember, *Kecamatan Jelbuk Dalam Angka*, (Jember: Satria-Utama, 2023). h. 269

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, fokus masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Jelbuk, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Jelbuk, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menawarkan arah pelaksanaannya. Tujuan harus diselaraskan dengan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perencanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Jelbuk, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Jelbuk, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menguraikan kontribusi yang diharapkan setelah penyelesaiannya. Manfaat ini mencakup aspek teoritis dan praktis dan harus bersifat realistis.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang akuntansi, memberikan pengalaman berharga, dan memberikan pengetahuan baru mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa).

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Desa dan menjadi dasar evaluasi sistem akuntansi pemerintah.

c. Penelitian Masyarakat Desa

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan perspektif kepada masyarakat Desa Jelbuk tentang standar akuntansi pemerintah, membantu mengurangi kekhawatiran tentang akuntabilitas desa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan konsep kunci yang merupakan inti dari topik penelitian.

1. Penerapan

Penerapan adalah proses mengaplikasikan teori, pengetahuan, dan konsep ke dalam praktik dunia nyata. Penerapan yang efektif memerlukan perencanaan yang cermat, sumber daya yang tepat, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan tujuan yang diinginkan tercapai dan hasil tetap terjaga.

2. Standar

Standar adalah seperangkat aturan, pedoman, atau spesifikasi yang ditetapkan untuk menjamin kualitas, keamanan, efisiensi, dan standarisasi dalam suatu bidang atau industri. Standar diterbitkan oleh organisasi internasional, badan nasional, industri, atau perusahaan tertentu. Standar memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk, layanan, dan sistem yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan.

3. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah adalah bidang khusus yang berfokus pada pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan dalam sektor publik, termasuk pemerintah pusat dan daerah serta badan pemerintah lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mengelola dana publik. Dengan memberikan laporan keuangan yang akurat, akuntansi pemerintah sangat penting untuk menunjukkan bagaimana sumber daya publik digunakan dan untuk mencerminkan status keuangan suatu negara atau wilayah.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah kerangka kerja penting yang dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah disusun dan disajikan secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan standar yang ditetapkan.

5. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) merupakan pedoman yang mengatur proses akuntansi dan pelaporan keuangan khusus pemerintahan desa. SAPDesa bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa serta memberikan informasi yang andal dan relevan kepada pemangku kepentingan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika diskusi menguraikan perkembangan tesis dari bab pengantar ke bab penutup. Format penulisan sistematis ini disajikan dengan cara deskriptif naratif daripada sebagai daftar isi tradisional.¹¹

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan konteks penelitian, fokus, tujuan, signifikansi, dan mendefinisikan istilah-istilah kunci.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan kerangka teoritis yang relevan dengan topik penelitian dan meninjau studi sebelumnya yang terkait dengan materi penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini merinci jenis penelitian, lokasi, subjek, teknik pengumpulan data, metode analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember; (IAIN Jember, 2020).

Bab IV Penyajian Data dan Analisis

Bab ini mencakup gambaran umum tentang objek penelitian, menyajikan dan menganalisis data, dan membahas temuan, yang merupakan komponen inti dari penelitian tesis.

Bab V Penutup

Bab ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi, berfungsi sebagai bagian terakhir dari tesis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti meninjau dan merangkum berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini, termasuk karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan seperti tesis, disertasi, dan artikel di jurnal ilmiah. Proses ini membantu peneliti menilai orisinalitas studi mereka dan menentukan posisinya dalam badan penelitian yang ada.¹²

1. M. Ridwan Tikollah, M. Yusuf A. Ngampo, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dengan fokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan ADD, yang mencakup 63 indikator di seluruh wilayah tersebut, sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metode kualitatif. Namun, perbedaan utamanya adalah pada peraturan yang mereka rujuk; sedangkan penelitian sebelumnya mengandalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, penelitian ini mengacu pada

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan kuesioner dan dokumentasi untuk pengumpulan data, sedangkan penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Khalil Gibran, Syahril Jaddang, dan Muh. Ardiansyah, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa dan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas belum sepenuhnya berpegang pada prinsip akuntabilitas. Indikator kesejahteraan yang diuji mengungkapkan bahwa masyarakat desa belum mencapai kemakmuran penuh. Beberapa desa belum memprioritaskan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat, sehingga upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan kurang efektif.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa keduanya meneliti Pemerintah Desa dan memanfaatkan

metode penelitian kualitatif. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus mereka: penelitian sebelumnya berpusat pada evaluasi kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini berkonsentrasi pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Desa.

3. Binti Ayuning Tiyas, Dyah Pravitasari, “Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Pembelanjaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung”.

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pucanglaban sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014, mengikuti proses lima tahap: perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Namun, pemerintah desa menghadapi tantangan, antara lain Sumber Daya Perangkat Desa yang tidak sepenuhnya menguasai teknologi saat ini dan seringnya perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dana desa. Meskipun Desa Pucanglaban telah mengadopsi SAP No. 71 Tahun 2010 dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan belum sejalan dengan Pernyataan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Perbedaan utamanya

adalah bahwa penelitian ini membahas empat prinsip akuntansi, sedangkan penelitian sebelumnya tidak mencakup prinsip-prinsip tersebut.

4. Santi Kartika Sari, “Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Waktu proses audit tidak dapat ditentukan secara tepat, karena tergantung pada pemerintah daerah yang mengirimkan pemberitahuan kepada pemerintah desa tentang kapan auditor akan tiba untuk melakukan audit. Hingga saat ini, Desa Tisnogambar belum menemukan temuan apa pun dari auditor. 2) Untuk mencegah potensi kecurangan, Desa Tisnogambar menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya menggunakan metode kualitatif, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian: penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada kecurangan dalam laporan keuangan desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Desa.

5. Anggi Lalita D. Salmon, Thobias E. D. Tomasowa, Rosdiana Mata, “Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima”.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Kabupaten Kelapa Lima sebagai SKPD telah menyiapkan anggarannya sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Kabupaten ini juga dinilai telah melaksanakan anggaran secara efektif. Namun, meskipun pengeluaran diklasifikasikan efektif pada 2017 dan 2018 dan cukup efektif pada 2019, pengeluaran aktual tidak memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Kekurangan ini disebabkan oleh pengeluaran yang tidak lengkap.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Bedanya terletak pada fokus penelitian: penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Desa.

6. Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, I Made Sudiartana, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendali Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, variabel sistem informasi akuntansi secara positif

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas Standar Akuntansi Pemerintah. Bedanya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif.

7. Afifah Aulia Khoirunnisa, Muhammad Arif, Juliana Nasution, “Peranan Pengelolaan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Bah Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun”.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) Mekanisme pengelolaan keuangan desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menguraikan lima siklus pengelolaan keuangan: perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. 2) Pemerintah desa menghadapi tantangan termasuk kemampuan sumber daya manusia yang rendah dan dukungan pemerintah yang terbatas. 3) Dalam hal penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 untuk akuntabilitas keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya mematuhi standar ini. Laporan keuangan Desa Bah Jambi III hanya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan setengah tahunan ke tingkat yang lebih tinggi, karena pemahaman pemerintah desa tentang prinsip akuntansi yang terbatas. Namun, pemerintah desa berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan akuntansi perangkat desa untuk memastikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAP). Perbedaannya terletak pada regulasi yang dirujuk: penelitian sebelumnya mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35, sedangkan penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

8. Yungki Akbar, Hendra Harmain, Arnida Wahyuni Lubis, “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dengan Investasi Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Tinjauan Islam (Studi Kasus Desa Ulumahuam)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi 0,817, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah melalui investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP melalui investasi tidak sesuai harapan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya berfokus pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Bedanya, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

9. Dani Rachman, Syifa Vidya Sofwan, Siska Amelia, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi AKuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Survei Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah maupun Sistem Informasi Akuntansi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan Koefisien Penentuan sebesar 64,5%. Artinya, 35,5% faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan disebabkan oleh variabel yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas standar akuntansi pemerintah. Bedanya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif.

10. Ananda Fitriana, "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menggali Potensi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)".

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ramban Kulon, dan 2) mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan penunjang dalam meningkatkan pendapatan usaha tersebut di Desa Ramban Kulon.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa belum optimal karena beberapa faktor. 2) Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes Desa Ramban Kulon antara lain: tidak

memadainya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, rendahnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam mempertahankan BUMDesnya, unit usaha tidak memenuhi target, kurangnya evaluasi dan kontrol oleh pemerintah desa, dan kesulitan dalam mendapatkan kembali investasi usaha. Faktor pendukung meliputi: 1) Ketersediaan modal BUMDes, dan 2) Antusiasme manajemen BUMDes.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya: penelitian ini berkonsentrasi pada penerapan standar akuntansi pemerintah, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada Badan Usaha Milik Desa.

Untuk merangkum penelitian sebelumnya dengan jelas, Tabel Penelitian Sebelumnya dapat digunakan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M.Ridwan Tikollah, M. Yusuf A. Ngampo (2020)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian sebelumnya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No

No	Nama/tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				71 Tahun 2010. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan kuesioner dan dokumentasi untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2	Khalil Gibran, Syahril Jaddang, dan Muh.Ardiansyah (2021)	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jangka	Sama-sama membahas tentang standar akuntansi pemerintahan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Fokus penelitian terdahulu adalah evaluasi kesejahteraan masyarakat sedangkan fokus penelitian ini adalah SAPDesa
3	Binti Ayuning Tiyas, Dyah Pravitasari (2021)	Pengelolaan Keuangan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah No.71 Tahun 2010 Di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan sama-sama mengacu pada Peraturan Pemerintah NO.71 Tahun 2010	Penelitian terdahulu tidak membahas 4 asas akuntansi sedangkan penelitian ini membahas 4 asas akuntansi
4	Santi Kartika Sari (2021)	Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa	Sama-sama menggunakan metode	Fokus penelitian terdahulu

No	Nama/tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Tisnogambar	Penelitian kualitatif	Adalah <i>fraud</i> pada laporan keuangan dana desa, sedangkan fokus penelitian ini adalah SAPDesa
5	Anggi Lalita D. Salmon, Thobias E.D.Tomasowa, Rosdiana Mata	Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Fokus penelitian terdahulu adalah penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja, sedangkan fokus penelitian ini adalah SAPDesa
6	Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, I Made Sudiartana (2021)	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kabupaten Karangasem	Sama-sama membahas tentang standar akuntansi pemerintah	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
7	Afifah Aulia Khoirunnisa, Muhammad Arif, Juliana Nasution (2023)	Peran Manajemen Keuangan Dalam Memastikan Pertanggung Jawaban Pengeluaran Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Di Desa Bah Jambi III	Sama-sama membahas tentang standar akuntansi pemerintahan	Penelitian sebelumnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.1, sedangkan penelitian ini didasarkan pada Peraturan

No	Nama/tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Pemerintah No.71 Tahun 2010
8	Yungki Akbar, Hendra Harmain, Arnida Wahyuni Lubis (2023)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Konteks Islam; Studi Kasus Desa Ulumahuam	Sama-sama membahas tentang standar akuntansi pemerintahan	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
9	Dani Rachman, Syifa Vidya Sofwan, Siska Amelia (2023)	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan; Survei Pemerintah Desa Di Kabupaten Arjasari	Sama-sama membahas tentang standar akuntansi pemerintahan	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
10	Ananda Fitriana (2023)	Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menggali Potensi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso	Kedua penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif	Fokus penelitian terdahulu adalah BUMDes sedangkan fokus penelitian ini adalah SAPDesa

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

Bagian ini menyajikan pembahasan tentang teori-teori yang digunakan sebagai perspektif dalam penelitian. Eksplorasi menyeluruh dari teori yang relevan akan memperluas pemahaman peneliti dan membantu dalam menganalisis masalah sejalan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai kerangka kerja atau alat analitis daripada subjek yang akan diuji, seperti halnya dalam penelitian kuantitatif.¹³

1. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah mengacu pada proses penyediaan informasi keuangan tentang kegiatan pemerintah melalui pencatatan, klasifikasi, ringkasan, dan interpretasi transaksi keuangan. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan akuntan publik, industri akuntansi telah berkembang untuk memasukkan akuntansi publik sebagai komponen penting. Integrasi ini telah menyebabkan keragaman yang lebih besar dalam bidang akuntansi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan bahwa laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang merinci posisi keuangan dan transaksi entitas pelapor. Hal ini ditegaskan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 Ayat 9. Standar ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum untuk meningkatkan komparabilitasnya di

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember, (IAIN Jember, 2020)

seluruh anggaran, periode, dan entitas. Laporan keuangan tujuan umum dirancang untuk memenuhi kebutuhan umum sebagian besar pengguna. Untuk mencapai hal ini, Standar Akuntansi Pemerintah menguraikan semua pertimbangan untuk menyajikan laporan keuangan, termasuk pedoman untuk struktur dan persyaratan konten minimumnya.¹⁴

Permendagri No. 64 Tahun 2013, Pasal 1, ayat (10) mendefinisikan dasar akrual sebagai pendekatan akuntansi yang mencatat dampak transaksi dan peristiwa ketika terjadi, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Pasal 1, ayat (8), menjelaskan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagai standar yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, dan juga mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran menurut APBN/APBD. Di bawah dasar akrual untuk neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat pada saat transaksi atau peristiwa yang mempengaruhi keuangan pemerintah, terlepas dari waktu arus kas.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual diterapkan di sektor pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah serta unit organisasi di dalam entitas tersebut, asalkan peraturan perundang-undangan mengamankan penyusunan laporan keuangan. SAP berbasis

¹⁴ Daniel Kartika Adhi Dan Yohanes Suhardjo, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)', *Jurnal STIE Semarang*, Vol 5 No. 3, (2013), 96.

akrual dituangkan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan didukung oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Baik PSAP maupun Kerangka Konseptual SAP Berbasis Akrual dirinci dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah berfungsi sebagai dasar dasar untuk mengembangkan dan menyiapkan standar akuntansi. Ini memberikan panduan bagi pembuat standar, penyusun laporan keuangan, auditor, dan pengguna untuk mengatasi masalah yang tidak secara eksplisit tercakup dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Kerangka kerja ini mencakup berbagai aspek, termasuk tujuan kerangka kerja, lingkungan akuntansi pemerintah, kebutuhan pengguna, entitas akuntansi dan pelaporan, tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, landasan hukum pelaporan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif laporan keuangan, prinsip akuntansi, kendala informasi yang relevan dan dapat diandalkan, serta pengakuan dan pengukuran elemen laporan keuangan.¹⁵

2. Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik adalah entitas yang berbeda karena karakteristiknya yang unik. Ini dianggap sebagai entitas karena mengelola sumber daya ekonomi yang besar, seringkali dalam skala yang sangat besar. Tidak seperti perusahaan komersial yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, organisasi sektor publik menangani transaksi

¹⁵ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017). 108

ekonomi dan keuangan tanpa tujuan utama menghasilkan keuntungan. Akuntansi sektor publik, kadang-kadang disebut sebagai akuntansi dana publik, melibatkan metode dan analisis akuntansi yang digunakan dalam organisasi sektor publik. Ini terkait erat dengan penerapan dan pengelolaan praktik akuntansi di domain publik.

Menurut Bastian, "Akuntansi sektor publik mengacu pada teknik akuntansi dan mekanisme analitis yang digunakan untuk mengelola dana publik di lembaga negara dan departemennya, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha publik regional (BUMD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan yayasan sosial yang terlibat dalam proyek kerja sama sektor publik dan swasta."¹⁶

Menurut Abdul Hafiz, akuntansi sektor publik melibatkan proses mengklasifikasikan, mencatat, dan meringkas transaksi, jumlah moneter, dan peristiwa dengan menggunakan metode tertentu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari laporan administrasi pemerintah yang berpegang pada prinsip otonomi dan bantuan, berdasarkan prinsip otonom dan sistem NKRI.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yang bertujuan untuk mengambil keputusan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui pelayanan publik yang diberikan oleh entitas pemerintah dan korporasi.

¹⁶ Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta: Erlangga. 2010).

¹⁷ Sarwenda Biduri, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sidoarjo: Umsida Press. 2018). 2

Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk menyampaikan informasi kepada manajer, memungkinkan mereka untuk mengelola kegiatan pemerintah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik tentang pengelolaan dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi sektor publik membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif, cepat, dan ekonomis dalam organisasi.

Praktik akuntansi yang efektif dan pengawasan yang ketat terhadap kualitas laporan keuangan oleh lembaga pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kerjanya, yang mengarah pada pelaksanaan fungsi pemerintah yang optimal. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi, sehingga berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik oleh pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Pemerintahan Desa

Istilah "Desa" berasal dari kata India "swadesi", yang berarti tempat asal, tempat tinggal, tanah air, atau tanah leluhur. Ini mengacu pada unit kehidupan yang berbeda yang ditandai dengan kesatuan norma dan batas-batas yang jelas.¹⁸

Bintarto, seperti dikutip oleh Wasistiono dan Tahir mendefinisikan desa sebagai hasil dari interaksi antara sekelompok orang

¹⁸ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015). 9.

dan lingkungannya. Interaksi ini menghasilkan bentuk atau penampilan tertentu di tanah, dibentuk oleh interaksi unsur-unsur fisiologis, sosial-ekonomi, politik, dan budaya, serta hubungannya dengan daerah lain.¹⁹

Menurut Bouman, seperti yang dikutip oleh Wasistiono dan Tahir sebuah desa digambarkan sebagai salah satu bentuk kehidupan komunal tertua, biasanya terdiri dari beberapa ribu orang yang hampir semuanya saling berkenalan. Sebagian besar penduduk terlibat dalam pertanian, perikanan, atau kegiatan serupa yang dipengaruhi oleh hukum dan kondisi alam. Dalam pengaturan ini, ada banyak hubungan keluarga yang dekat, kepatuhan terhadap tradisi, dan kepatuhan terhadap aturan sosial.²⁰

Berdasarkan pendapat di atas, sebuah desa dapat disimpulkan sebagai unit masyarakat yang sah yang dihuni oleh individu-individu yang saling akrab, memiliki batas-batas teritorial yang ditentukan. Hal ini ditandai dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola baik pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah desa dikelola oleh Kepala Desa, yang didukung oleh Perangkat Desa, sebagai bagian dari administrasi desa. Dalam konteks pemerintahan negara, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat, menjaga, dan memenuhi kebutuhannya karena sifatnya yang memaksa dan eksklusif. Melalui pengawasan pemerintah, semua wilayah

¹⁹ Rahyunir Rauf, dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, 9.

²⁰ Rahyunir Rauf, dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, 10.

dan batas-batasnya dapat dikendalikan, dipantau, dan dikelola secara efektif. Setiap daerah, dari desa dan kecamatan hingga kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, memiliki struktur pemerintahan dan administrasi masing-masing.

Pemerintah desa memanfaatkan dana APBDesa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa, termasuk berbagai proyek pembangunan dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa diwajibkan untuk mengelola keuangan secara tertib, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.²¹

Desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh warga desa yang memenuhi syarat, warga Negara Republik Indonesia, dan menjabat selama sembilan tahun sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling lama dua masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Masa jabatan Kepala Desa diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah sembilan tahun sejak tanggal pelantikan, dan ayat (2), yang memungkinkan sampai dengan dua masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang didukung oleh Sekretaris Desa dan berbagai perangkat desa. Perangkat desa

²¹ Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Winarna, 'Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri, *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 16 No. 1. (2016), 39.

meliputi kepala urusan, yang membantu Sekretaris Desa dengan informasi dan layanan, dan kepala dusun, yang bertindak sebagai wakil Kepala Desa di daerahnya. Urusan desa melibatkan pengelolaan dan pengaturan masalah lokal di bawah kewenangan pemerintah desa. Untuk mengelola urusan tersebut, pemerintah desa menetapkan peraturan desa. Peraturan ini dibuat oleh Kepala Desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa menerapkan peraturan tersebut dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.

Menurut Maulidiah, Kepala Desa diberi wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini meliputi pembuatan peraturan desa, seperti Peraturan Desa, keputusan desa, atau keputusan Kepala Desa, serta mengelola fungsi pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Maulidiah lebih lanjut mencatat bahwa dalam pengaturan dan pengelolaan desa, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga "hak asal dan hak adat" desa setempat. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia secara resmi mengakui dan menghormati hak-hak tradisional tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu,

²² Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanaf Publishing, 2015). 40

peraturan desa juga harus mempertimbangkan hak-hak adat dan adat masyarakat setempat ini.²³

4. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pemerintah desa, termasuk pengelolaan keuangannya, harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban Desa yang dapat diukur dalam istilah moneter, serta segala bentuk uang dan barang yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Pertanggungjawaban keuangan desa ditunjukkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Untuk memastikan akuntabilitas keuangan yang tepat, laporan ini harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). SAPDesa dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) independen dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah, dengan masukan dari Badan Audit Keuangan.

Penyusunan SAPDesa dikelola oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui proses formal yang dikenal dengan due process, yang diawasi oleh para profesional KSAP. Persiapan ini didorong oleh semakin pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan desa, terutama dengan munculnya dana desa. Kebutuhan akan standar ini disorot dalam Rapat Pleno KSAP dengan Komite Permusyawaratan Standar Akuntansi Pemerintah. Setelah ini, Pertemuan

²³ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015). 40

Tingkat Tinggi lintas kementerian lebih lanjut mendukung peran KSAP sebagai penentu standar, yang mengizinkannya untuk mengembangkan SAPDesa.²⁴

Desa sebagai unit organisasi pemerintah memainkan peran strategis dengan mengelola dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka. Pembukuan desa memerlukan pencatatan semua transaksi, mendokumentasikannya, dan menggunakan catatan dan laporan keuangan untuk memungkinkan pemangku kepentingan mengawasi dan mengawasi keuangan desa. Mengingat penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dana masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa, praktik akuntansi perangkat desa saat ini mendapat perhatian yang signifikan.²⁵

Akuntansi desa meliputi kewajiban untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan desa, selaras dengan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pedoman tata kelola keuangan desa.²⁶ Menurut peraturan ini, pengelolaan keuangan desa termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas harus dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin. Keuangan desa dikelola dalam satu tahun fiskal, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember.

²⁴ Standar Akuntansi Pemerintahan Desa – Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

²⁵ Siti Ainul Wilda, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”, *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Universitas Jember*, Vol IV (2), (2017). 148.

²⁶ Siti Fatimah Az-Zahra, Nurbati, Laylan Syafina, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa”, *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, Vol 9 No.1, (2023). 147.

a. Transparan

Nordiawan menjelaskan bahwa transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran informasi keuangan, yang memungkinkan masyarakat untuk sepenuhnya memahami dan mengakses detail tentang akuntabilitas dan kepatuhan hukum atas tindakan pemerintah. Ini mewujudkan prinsip memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengakses informasi mengenai kegiatan pemerintah, termasuk kebijakan, proses implementasi, dan hasil yang dicapai.

Menurut Tjahnulin Domai, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengakses dan memahami berbagai informasi mengenai keuangan daerah.²⁷

b. Akuntabel

Pertanggung jawaban adalah tanggung jawab seorang wali amanat untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dipercayakan kepada mereka kepada semua pihak terkait yang memegang hak dan wewenang.

c. Partisipatif

Partisipatif mengacu pada hak setiap warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa mereka. Keterlibatan ini dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

²⁷ Tjahnulin Domai, *Manajemen Keuangan Publik*, (Malang: UB Press, 2013), 140.

d. Tertib

Tata tertib administratif dalam pengelolaan keuangan negara mengacu pada penerapan praktik pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup pengelolaan keuangan negara yang tertib, termasuk pemisahan investasi dan aset, sebagaimana dituangkan dalam APBD dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Manajemen yang tertib berarti bahwa prosedur yang ditetapkan, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang relevan dalam praktik keuangan pemerintah.

e. Disiplin Anggaran

Disiplin anggaran dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran desa meliputi :

- 1) Memastikan bahwa pendapatan yang diproyeksikan didasarkan pada perkiraan yang realistis dan terukur untuk setiap sumber pendapatan, dan bahwa pengeluaran yang dianggarkan mewakili batas pengeluaran maksimum yang diizinkan.
- 2) Pengeluaran yang dianggarkan harus didukung oleh ketersediaan yang dikonfirmasi, dan kegiatan tidak dapat dilanjutkan jika tidak memiliki alokasi anggaran yang memadai dalam APBD atau perubahannya.

- 3) Seluruh pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran harus dimasukkan ke dalam APBD dan diproses melalui rekening kas desa.

5. Good Corporate Governance

Governance adalah tindakan dalam pelaksanaan pemerintahan, atau dengan kata lain, cara mengelola urusan publik. Menurut *World Bank*, *governance* adalah bagaimana pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk tujuan pembangunan. Sementara itu, menurut *United Nations Development Program*, *governance* menitik beratkan pada aspek politik terkait pembuatan kebijakan, aspek ekonomi dalam proses kebijakan ekonomi yang berdampak pada pemerataan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, serta aspek administrasi yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Dari sini diharapkan tercapainya *good governance*.²⁸

Good Corporate Governance adalah sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja optimal perusahaan tanpa merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan baik sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing.²⁹

²⁸ Enita Binawati, dan Junaidi Affan. "AKUNTABILITAS DANA DESA." (2022). h. 38.

²⁹ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Jakarta Selatan: Norlive Kharisma Indonesia. 2016) h. 14.

Pencapaian *good governance* dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, terutama melalui akuntabilitasnya. Pemerintah daerah harus mampu mempertanggung jawabkan pelayanan publik dengan transparansi sebagai wujud dari *good governance*.

Dalam lembaga pemerintahan, konsep *Good Corporate Governance* lebih menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan peningkatan daya saing antar daerah secara konstruktif. Salah satu manfaat dari penerapan prinsip ini adalah meningkatkan kinerja pemerintahan melalui pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, dan peningkatan pelayanan kepada publik.³⁰

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima prinsip utama dalam *good corporate governance*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta keadilan dan kesetaraan.³¹

a. Transparansi

Prinsip dasar transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasi yang penting dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam

³⁰ Enita Binawati, dan Junaidi Affan. "AKUNTABILITAS DANA DESA." (2022). h. 39.

³¹ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Jakarta Selatan: Norlive Kharisma Indonesia. 2016) h. 22.

operasional bisnisnya. Dalam pedoman pelaksanaannya, asas transparansi berarti bahwa perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak mereka.

b. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas dalam penerapan *good corporate governance* menekankan bahwa perusahaan harus mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Berdasarkan prinsip ini, perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota perusahaan dan semua karyawan, serta memastikan bahwa semuanya sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota perusahaan serta seluruh karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. Responsibilitas

Prinsip dasar dalam asas responsibilitas menyatakan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan, agar dapat menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang dan diakui sebagai warga korporasi yang baik. Dalam pelaksanaannya,

anggota perusahaan harus mengikuti prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar lokasi perusahaan, melalui perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi

Prinsip dasar untuk mendukung pelaksanaan asas independensi mengharuskan perusahaan dikelola secara mandiri, sehingga setiap anggota perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman untuk pelaksanaan asas ini adalah bahwa setiap anggota perusahaan harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan dan segala bentuk pengaruh atau tekanan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip dasar yang berlandaskan pada asas kewajaran dan kesetaraan menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas tersebut. Dalam pelaksanaan prinsip ini, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan

masukan dan menyampaikan pendapat demi kepentingan perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi yang berlaku bagi setiap pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Seperti yang dijelaskan Creswell, pendekatan penelitian kualitatif berfokus pada konstruksi pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, seperti makna yang berasal dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah, dengan tujuan mengembangkan teori atau pola pengetahuan. Ini mungkin juga melibatkan perspektif partisipatif, menekankan aspek-aspek seperti politik, isu, kolaborasi, atau perubahan.³²

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman pengaturan dan individu secara holistik, tanpa mengisolasi mereka ke dalam variabel atau hipotesis, melainkan melihatnya sebagai bagian integral dari keseluruhan yang lebih besar.³³ Dalam penelitian kualitatif, peneliti diharapkan dapat menjelaskan fenomena berdasarkan kerangka teoritis yang dikembangkan selama penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk bergerak melampaui teori yang sudah ada sebelumnya yang ditemukan dalam literatur, yang mungkin tidak selaras dengan pengamatan dunia nyata. Untuk penelitian ini, penelitian dilakukan di

³² Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 21

³³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. (Solo: Cakra Books, 2014). 8

Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.³⁴ Untuk penelitian ini, penelitian dilakukan di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Jelbuk yang berlokasi di Jalan Raden Ajeng Kartini, Nomor 06, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Desa Jelbuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena masalah penting mengenai kekhawatiran masyarakat tentang akuntabilitas desa, yang dianggap tidak sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa).

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan. Metode ini melibatkan pemilihan individu yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan memenuhi kriteria penelitian.

Berikut ini adalah informan yang akan diwawancarai oleh penulis:

1. Sekretaris Desa Jelbuk yaitu Bapak Sujono
2. Bendahara Desa Jelbuk yaitu Ibu Harumi Isnaini
3. Kepala Seksi Pelayanan yaitu Bapak Samsul
4. Kepala Seksi Pemerintahan yaitu Bapak Moh. Hairur Rosi

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

³⁴ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 15.

1. Observasi

Observasi partisipan adalah metode di mana peneliti terlibat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang diteliti. Pendekatan imersif ini memberikan wawasan yang lebih jelas tentang fenomena yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini, penulis akan mengunjungi Kantor Desa Jelbuk untuk melakukan penelitian dan wawancara dengan informan terpilih.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi verbal dan dapat dilakukan dalam format terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yang melibatkan serangkaian pertanyaan yang disiapkan sambil memungkinkan munculnya pertanyaan tambahan berdasarkan konteks percakapan. Wawancara dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Untuk penelitian ini, penulis mewawancarai perangkat desa terpilih, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi Layanan, dan Kepala Bagian Pemerintahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pencatatan peristiwa yang telah terjadi, mencakup berbagai bentuk seperti teks tertulis, gambar, atau karya penting. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk

mengumpulkan data melalui berbagai jenis dokumen, termasuk teks, rekaman audio, dan materi audiovisual.

E. Analisis Data

Analisis data melibatkan pencarian dan kompilasi informasi yang dikumpulkan secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini meliputi mengkategorikan dan mendeskripsikan data, mensintesis dan mengaturnya ke dalam pola, mengidentifikasi informasi kunci, dan menarik kesimpulan untuk membuat data dapat dimengerti oleh peneliti dan orang lain.³⁵ Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif melibatkan beberapa langkah:³⁶

1. Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya melibatkan penyortiran dan pengaturannya ke dalam tema dan kategori berdasarkan bidang penelitian. Proses ini meliputi membuang informasi yang tidak relevan, meringkas data dalam unit analisis, dan memeriksanya kembali untuk mengelompokkannya sesuai dengan masalah penelitian. Setelah mengurangi data, dijelaskan dalam kalimat terperinci untuk memberikan pandangan komprehensif tentang masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap ini melibatkan penyajian data dalam format naratif. Peneliti menjelaskan temuan menggunakan deskripsi terperinci, bagan,

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung:Alfabeta, 2019).

³⁶ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publisings, 2020)

dan hubungan antar kategori dalam urutan yang terorganisir secara sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Sementara kesimpulan dapat berkembang seiring dengan data yang disempurnakan, tahap ini melibatkan pembentukan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Ini mencakup proses pengumpulan data, seleksi, triangulasi, kategorisasi, deskripsi, dan kesimpulan akhir. Temuan dari wawancara dan observasi disajikan dengan jelas dan objektif untuk meminimalkan bias. Data dikategorikan secara tematik dan diatur ke dalam bagian deskriptif yang mendukung pernyataan penelitian. Kesimpulan diturunkan secara induktif, tanpa membandingkan temuan individu satu sama lain.

F. Keabsahan Data

Teknik validitas data menilai keakuratan data dan proses penelitian. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan sebagai metode utama untuk memvalidasi data. Triangulasi melibatkan verifikasi data dengan menggunakan berbagai sumber atau teknik untuk memeriksa silang dan membandingkan temuan.³⁷ Tujuan triangulasi adalah untuk mengkonfirmasi keakuratan data dengan membandingkannya dengan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber pada berbagai tahap penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan triangulasi sumber, yang melibatkan

³⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books: 2015), 115.

verifikasi data dengan referensi silang dengan informasi dari berbagai sumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Fase penelitian ini menguraikan rencana untuk melaksanakan penelitian, yang mencakup segala sesuatu mulai dari tinjauan penelitian awal, pengembangan desain, dan kerja lapangan aktual hingga penulisan laporan akhir. Tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini melibatkan kegiatan persiapan yang dilakukan sebelum pengumpulan data dimulai. Dimulai dengan eksplorasi lapangan untuk mengidentifikasi masalah atau fokus penelitian. Langkah-langkah terperinci meliputi:

- a. Menyusun rencana lapangan
- b. Memilih situs penelitian
- c. Mengelola izin
- d. Mengunjungi dan mengevaluasi lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informasi
- f. Menyiapkan bahan penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap kerja lapangan melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Selama fase ini, peneliti mengumpulkan data yang sejalan dengan fokus dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti

melakukan wawancara langsung dengan informan kunci, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi Layanan, dan Kepala Seksi Pemerintahan.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data melibatkan pengorganisasian dan pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data diselaraskan dengan rumusan penelitian, maka akan diringkas dan dijelaskan secara ringkas, didukung oleh data dan dokumen yang dikumpulkan. Peneliti kemudian akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dari laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Jelbuk, yang terletak di wilayah timur Kabupaten Jember, terkenal dengan sumber daya pertanian dan budayanya yang kaya. Desa ini memiliki topografi yang beragam dengan daerah perbukitan dan dataran rendah, mendukung berbagai kegiatan pertanian dan ekonomi. Meliputi area seluas 3.237 km², Desa Jelbuk terletak di pusat Kecamatan Jelbuk, sekitar 100 meter dari kantor kecamatan. Batas-batas Desa Jelbuk dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Jelbuk

No	Letak	Batas Wilayah	Kecamatan
1	Sebelah Barat	Desa Panduman	Kecamatan Jelbuk
2	Sebelah Timur	Desa Sukowiryo	Kecamatan Jelbuk
3	Sebelah Utara	Desa Sukoember	Kecamatan Jelbuk
4	Sebelah Selatan	Desa Candijati	Kecamatan Arjasa

Sumber: Profil Desa Jelbuk

Desa Jelbuk terletak 12 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Jember, jarak yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 24 menit dengan mobil atau sepeda motor. Desa ini dilengkapi dengan gedung perkantoran yang terawat dengan baik yang mencakup fasilitas untuk empat komputer, dua laptop, dan satu printer. Warga Desa Jelbuk terutama menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua untuk transportasi. Infrastruktur jalan desa berkembang dengan baik, dengan jalan beraspal memanjang ke desa-

desa tetangga. Desa Jelbuk terbagi menjadi lima dusun: Krajan Barat, Krajan Timur I, Krajan Timur II, Tenggir Barat, dan Tenggir Timur.

Desa Jelbuk memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Jelbuk. Menurut sensus penduduk tahun 2023, desa ini memiliki 4.025 penduduk, 1.995 laki-laki dan 2.030 perempuan, yang terdiri dari 1.467 rumah tangga. Mayoritas penduduk Jelbuk bekerja sebagai buruh tani, yang mencerminkan kondisi topografi desa. Selain itu, masyarakat terlibat dalam berbagai pekerjaan lain, termasuk perdagangan, peternakan, pertanian, buruh, pegawai negeri, pekerjaan swasta, dan wiraswasta. Banyak buruh juga bekerja di luar kota atau bahkan di luar pulau.

Desa Jelbuk adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis, termasuk Jawa, Madura, dan lainnya, dengan suku Madura dan Jawa menjadi suku yang dominan. Meskipun ada lebih sedikit kelompok etnis lain, termasuk mereka yang berasal dari luar Desa Jelbuk yang mungkin tinggal atau bekerja di sana, komunitas mempertahankan konsistensi yang harmonis dan saling menghormati. Mayoritas penduduk Jelbuk mempraktikkan Islam. Bahasa Madura, dan Indonesia adalah bahasa yang umum digunakan. Kehidupan sosial di Desa Jelbuk ditandai dengan rasa kebersamaan yang kuat, dibuktikan dengan kegiatan gotong royong rutin di setiap dusun, perayaan hari raya keagamaan, toleransi antar agama, dan perkawinan antar suku.

1. Visi dan Misi Desa Jelbuk

a. Visi

Pengembangan pelayanan yang kreatif dan inovatif di pemerintahan bertujuan untuk menjamin kemakmuran masyarakat Desa Jelbuk, baik secara materi maupun mental.

b. Misi

Misi yang diemban dalam mewujudkan visi diatas adalah :

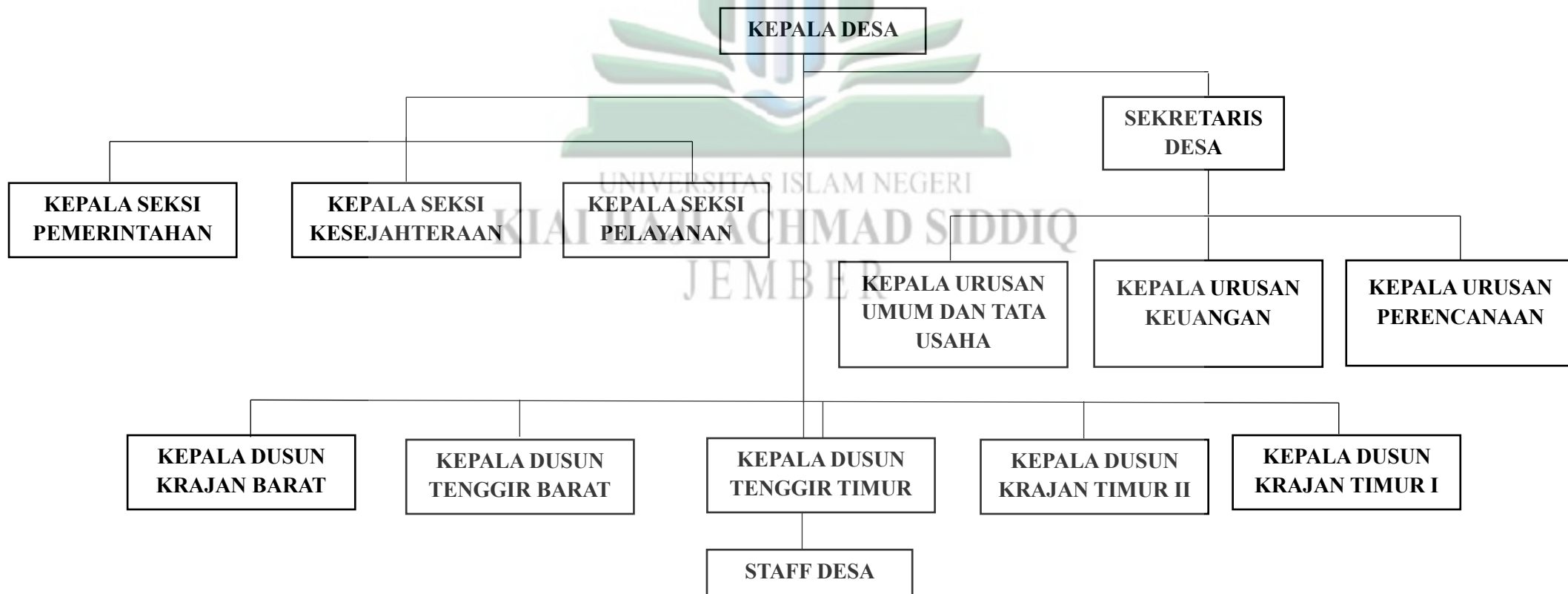
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan
2. Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
3. Menggali potensi unggulan desa.
4. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2. Struktur Organisasi Desa Jelbuk

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN

DESA JELBUK KECAMATAN JELBUK



B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dan analisis data adalah komponen penting dari penelitian. Dengan demikian, data yang dianalisis dan temuan dari analisis ini membentuk kesimpulan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan memperkuat dan mendukung penelitian.

1. Perencanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk

Standar Akuntansi Pemerintah saat ini didasarkan pada akuntansi akrual, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem berbasis akrual ini, yang dikenal dengan SAP, mengakui penerimaan dari laporan operasional, pengeluaran, aset, laporan realisasi anggaran, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam APBN/Daerah.³⁸

Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Jelbuk mengacu pada PSAP 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAP 1 bertujuan untuk mengatur penyajian laporan untuk tujuan umum pemerintahan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Unit pemerintah menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual dan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang diatur

³⁸ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2017), h. 105.

dalam Undang-Undang.³⁹ PSAP 1 terdapat 7 penyajian laporan keuangan yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem pencatatan keuangan di Desa Jelbuk menggunakan sistem *single entry* atau pencatatan tunggal, data keuangan diinput pada komputer dengan bantuan program *Microsoft Excel*. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Desa Bapak Sujono :

Desa Jelbuk menggunakan sistem pencatatan tunggal yang data keuangannya dimasukkan ke dalam komputer menggunakan program *Microsoft Excel*. Sistem ini dipilih karena relatif sederhana dan mudah dipahami, bahkan bagi pegawai desa yang tidak mengetahui akuntansi lebih dalam. Proses pencatatan ini mencakup pemasukan dan pengeluaran harian, serta laporan bulanan dan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. Sebagai Sekretaris Desa, saya bertanggungjawab mendokumentasikan seluruh kegiatan dan laporan terkait pelaksanaan SAPDesa. Saya memastikan seluruh pencatatan keuangan mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tantangan yang kita hadapi adalah mencocokkan data dari berbagai sumber, namun dengan koordinasi yang baik dapat diatasi.⁴⁰

Tambahan dari Ibu Harumi Isnaini sebagai Bendahara Desa Jelbuk bahwa :

Peran saya sebagai Bendahara adalah memastikan semua transaksi keuangan tercatat dengan baik dan akurat sesuai SAPDesa. Saya mencatat pemasukan dan pengeluaran sehari-hari menggunakan *Microsoft Excel* dan membuat laporan bulanan dan tahunan. Manfaat penerapan SAPDesa adalah peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.⁴¹

³⁹ Baldric Siregar, Akuntansi Sektor Publik (*Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*), (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 115.

⁴⁰ Sujono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2024.

⁴¹ Harumi Isnaini, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April. 2024.

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas perangkat Desa Jelbuk saat ini memiliki pengetahuan yang minim terhadap akuntansi. Dengan begitu, rutin diadakan *workshop* tentang pengenalan Akuntansi Pemerintahan lebih mendalam agar dapat membantu perangkat desa untuk memahami dan menyusun laporan pertanggung jawaban. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Moh. Hairur Rosi selaku Kepala Seksi Pemerintahan :

Saya bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan SAPDesa dengan seluruh perangkat desa. Tantangan yang kami hadapi antara lain, memastikan semua data keuangan dicatat secara akurat sesuai standar yang telah ditetapkan laporan keuangan. Standar ini juga memudahkan dalam menilai dan memantau penggunaan anggaran desa. Kurangnya pemahaman awal tentang SAPDesa di kalangan perangkat desa dan terbatasnya sumber daya manusia yang mengetahui akuntansi. Ya, kami melakukan *workshop* dengan bantuan Pemerintah Kabupaten sektor swasta dengan mengadakan pelatihan rutin untuk membantu penerapan lebih lanjut. Kami juga menerima modul SAPDesa. Kami juga sering berkonsultasi dengan lembaga terkait dalam proses ini untuk memastikan keberhasilan penerapan standar ini seperti dukungan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa).⁴²

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Samsul selaku Kepala Seksi Pelayanan :

Tugas saya adalah memastikan seluruh perangkat desa memahami pentingnya SAPDesa dan bagaimana mereka dapat menerapkan sistem ini untuk meningkatkan pelayanan publik. Kami menghadapi tantangan dalam hal pemahaman, namun dengan pelatihan dan sosialisasi, seluruh perangkat desa dapat memahami dan menggunakan sistem ini. Manfaat dari adanya kegiatan tersebut adalah masyarakat dapat percaya terhadap pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan.⁴³

⁴² Moh. Hairur Rosi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2024.

⁴³ Samsul, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2024.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut.⁴⁴

Ketua PKK Desa Jelbuk Ibu Nurul Apria Ningsih menambahkan bahwa:

Untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat sejauh ini kami melihat berupa seperti pembangunan jalan desa, seperti pembangunan irigasi, seperti itu.⁴⁵

Kader Posyandu Desa Jelbuk Ibu Luluk Anggraeni menambahkan bahwa:

Dana PMT itu didapatkan dari desa setiap bulannya sebesar Enam Puluh Ribu Rupiah untuk posyandu dan itu dana tetap setiap bulannya. Contohnya dibuat bola ubi, dan puding untuk anak-anak balita dan ibu hamil. Untuk gaji kader posyandu sendiri itu ada dua, yaitu yang dari desa itu namanya honor sebesar Tujuh Puluh Ribu Rupiah setiap bulannya.⁴⁶

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh beberapa tokoh dan lembaga masyarakat seperti, PKK, Posyandu, RW, RT, dan Karang Taruna. Setelah masing-masing tokoh masyarakat berkumpul, selanjutnya di bentuk rumusan tentang pengelolaan dana desa. Semua tokoh masyarakat yang berkumpul dapat memberi ide atau

⁴⁴ Afifah Aulia Khoirunisa, Muhammad Arif, Juliana Nasution, "Peranan Pengelolaan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Bah Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun," *ManBiz: Journal of Management & Business*, Vol 3 No. 1, (2024) 91.

⁴⁵ Nurul Apria Ningsih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 09 Oktober 2024.

⁴⁶ Luluk Anggraeni, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 Oktober, 2024.

masuk, dan solusi. Konsensus tercapai, dengan semua pemimpin masyarakat yang hadir menyetujui keputusan tersebut.

Kader Posyandu Desa Jelbuk Ibu Luluk Anggraeni mengatakan bahwa:

Untuk kader sendiri itu ketika ada keperluan posyandu, itu kita buat rencana dulu baru nanti diajukan pada saat rapat Musyawarah Masyarakat Desa. Kita mengajukan satu tahun sebelumnya yang biasanya terealisasi pada tahun berikutnya. Contohnya yang kader ajukan itu tahun kemarin alat cek hipertensi otomatis, timbangan dan pengukur tinggi badan. Nah itu kita dapat barangnya baru tahun ini. Jika kita ada keperluan mendesak kita gunakan uang kas posyandu. Dan pada saat pengajuan itu kita jelaskan untuk mendapatkan dana pengganti uang kas.⁴⁷

Lebih lanjut Ibu Nurul Apria Ningsih mengatakan bahwa:

Peran masyarakat secara tidak langsung kita memiliki perwakilan yaitu melalui BPD. Jadi misalkan masyarakat mempunyai keluhan tentang pemerintahan desa terutama keuangan kita bisa menyampaikan ke BPD karena di desa itu ada tim BPD yang menyampaikan keluhan dari masyarakat tentang pemanfaatannya untuk masyarakat kita bisa menyampaikan melalui forum BPD itu. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan kita bisa menyampaikan melalui pak RT karena pak RT itu pejabat paling bawah yang dekat dengan masyarakat. Agar pak RT dapat menyampaikannya ke pemerintah yang lebih di atas dari pak RT.⁴⁸

Setiap tahunnya, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). RKPDDes menguraikan semua program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun fiskal. Sumber Pendapatan Desa meliputi Dana Desa, Alokasi Dana

⁴⁷ Luluk Anggraeni, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 08 Oktober 2024.

⁴⁸ Nurul Apria Ningsih, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 08 Oktober 2024.

Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa, Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Belanja Desa mengacu pada anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yang dirinci dalam RKPDes, dan dibagi menjadi Biaya Operasional, Biaya Modal, dan Biaya Tak Terduga. Pembiayaan Desa digunakan untuk mengatasi defisit atau mengalokasikan surplus. Setelah RKPDes dan APBDes disusun, Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang APBDes. Rancangan ini ditinjau dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disetujui. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, rancangan Peraturan Desa dipresentasikan pada pertemuan desa untuk mengumpulkan umpan balik akhir masyarakat. Setelah musyawarah desa, APBDes disahkan oleh Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Desa dan kemudian diserahkan kepada Bupati untuk dievaluasi.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk

Penerapan SAPDesa melibatkan proses yang menyeluruh dan berkelanjutan yang mencakup perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini membantu Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan desa secara efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien untuk memberi manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan APBDes yang disetujui. Semua transaksi keuangan dicatat mengikuti peraturan SAP. Implementasi APBDes dipantau dan dievaluasi

secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan rencana dan peraturan yang ditetapkan. Pemerintah Desa membuat laporan bulanan dan tahunan yang merinci semua pendapatan, pengeluaran, dan saldo anggaran. Selain itu, laporan keuangan yang lebih komprehensif, termasuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas, disiapkan. Laporan ini disampaikan kepada BPD dan dibagikan kepada masyarakat melalui Forum Akuntabilitas Desa, serta diteruskan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dievaluasi.

Semua transaksi keuangan di desa didokumentasikan dalam Buku Kas Umum (BKU), yang secara kronologis mencatat semua pendapatan dan pengeluaran desa. Selain BKU, Desa juga memelihara buku pendamping yang lebih rinci, termasuk Buku Penolong Pajak, Buku Penolong Perbankan, dan catatan lain yang relevan sesuai kebutuhan. Praktik ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Harumi Isnaini, Bendahara Desa Jelbuk:

Setiap hari saya mencatat semua transaksi keuangan. Pencatatan ini meliputi seluruh sumber pendapatan seperti Pajak Desa, Sumbangan, Operasional Desa, Proyek Pembangunan, Pendapatan dan Pengeluaran yang lain. Kemudian transaksi keuangan itu dirangkum jadi laporan bulanan dan tahunan. Semua transaksi keuangan yang dicatat itu harus lengkap sumber dananya, tanggal, sama jumlah yang diterima dalam penerimaan. Begitu juga pengeluaran, itu dicatat secara rinci tanggal, jumlah, keperluan, sama bukti transaksinya seperti nota.⁴⁹

Dalam pelaporan keuangan juga harus dilakukan secara cermat dan teliti agar meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Laporan

⁴⁹ Harumi Isnaini, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 April 2024.

Realisasi Anggaran disusun secara berkala yaitu setiap bulan dan tahunan yang menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi penggunaan dana. Selain itu, Pemerintah Desa juga menyusun Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Pemerintah Desa juga mengawasi dan menilai pelaksanaan APBDes untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan sesuai dengan peraturan SAPDesa.

Laporan keuangan dan transaksi anggaran dapat diakses oleh publik melalui papan informasi desa, situs web desa, atau media lain yang tersedia. Pemerintah Desa melakukan rapat rutin untuk memberi tahu masyarakat dan membahas pengelolaan keuangan desa, seperti yang dicatat oleh Bapak Sujono, Sekretaris Desa:

Implementasi SAPDesa di Desa Jelbuk tampaknya berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa tantangan. Kami melakukan evaluasi secara berkala dengan mengumpulkan umpan balik dari seluruh perangkat desa dan masyarakat. Tujuan utama kami adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat secara akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kami juga menilai apakah laporan keuangan transparan dan dapat dipahami oleh publik. Setiap kesalahan dan masalah data ditangani melalui pelatihan tambahan dan peningkatan penggunaan teknologi.⁵⁰

Ketua PKK Desa Jelbuk Ibu Nurul menambahkan bahwa:

Untuk akses informasi laporan terkait laporan keuangan desa bisa kita lihat adanya seperti banner-banner laporan keuangan yang dipajang oleh pemerintah desa di halaman desa. Jadi masyarakat bisa mengetahui penyampaian pelaporan penggunaan dana desa tidak disampaikan secara mulut ke mulut,

⁵⁰ Sujono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 April 2024.

tapi disampaikan melalui media banner kan sering terpampang penggunaan APBDesa tahun sekian sejumlah berapa, untuk apa, kegiatannya untuk apa itu terpampang di banner.⁵¹

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Seksi Pelayanan

Bapak Samsul tentang transparansi pada SAPDesa:

Di bidang pelayanan publik, penerapan SAPDesa sangat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kami mengevaluasi anggaran berbagai proyek layanan digunakan dana apa kualitas layanannya meningkat atau tidak yang dirasakan oleh masyarakat. Memastikan dana yang digunakan untuk layanan publik benar-benar digunakan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata. Masukan dari masyarakat juga kami tampung untuk tau sejauh mana masyarakat puas terhadap layanan yang sudah diberikan.⁵²

Lebih rinci dari pernyataan tersebut, Bapak Moh. Hairur Rosi

selaku Kepala Seksi Pemerintahan menyatakan :

Pengelolaan keuangan dan operasional pemerintahan desa mengalami kemajuan yang signifikan dari seluruh aspek pelaksanaan SAPDesa dan menemukan dampak yang positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. laporan keuangan yang terstruktur dan rapi memudahkan kami untuk melakukan pemantauan dan evaluasi anggaran.⁵³

Ketua PKK Desa Jelbuk Ibu Nurul Apria Ningsih mengatakan

bahwa:

Manfaatnya banyak juga dirasakan oleh masyarakat jadi tidak hanya berupa fisik yang dibangun oleh desa tapi juga pembangunan melalui SDM berupa memberikan bantuan-bantuan dana atau uang kepada masyarakat rentan, contohnya misalkan kepada lansia, kepada keluarga atau masyarakat yang tidak mampu, kepada balita-balita stunting, kepada ibu-ibu hamil yang kekurangan gizi. Pemerintah desa itu memberikan bantuan misalkan kepada balita stunting atau ibu hamil yang kurang gizi memberikan bantuan

⁵¹ Nurul Apria Ningsih, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2024.

⁵² Samsul, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Mei 2024.

⁵³ Moh. Hairur Rosi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Mei 2024.

berupa PMT. Yang kategorinya kurang mampu pemerintah desa itu memberikan bantuan seperti BLT dan dana bantuan lainnya.⁵⁴

Beberapa evaluasi yang disampaikan yang oleh Perangkat Desa diatas menunjukkan bahwa penerapan SAPDesa memberikan dampak yang positif terhadap pengelolaan keuangan dan Pemerintahan Desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Kepala Desa dan Aparatur Desa melakukan pengawasan internal untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dan dilaporkan secara akurat. Selain itu, audit eksternal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Kabupaten Jember untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan hasil temuan ini, didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Jelbuk dan teori yang relevan. Pembahasan akan dibagi secara rinci sesuai dengan fokus permasalahan yang telah diidentifikasi terkait dengan isu yang terjadi di lapangan sebagai berikut :

1. Perencanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk

Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Baldrice Siregar, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan serta merupakan acuan bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan,

⁵⁴ Nurul Apria Ningsih, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2024.

pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.⁵⁵ Pemerintah Desa Jelbuk belum menyusun Laporan Keuangan sesuai PSAP 1, yang meliputi tujuh jenis laporan: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Kelebihan Saldo Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan. Saat ini, Pemerintah Desa Jelbuk hanya menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan APBD setiap tahunnya. Berikut ini merupakan laporan realisasi anggaran desa Jelbuk pada tahun 2022.

Aparatur Desa Jelbuk belum sepenuhnya mengenal istilah akuntansi, tetapi *workshop* diadakan secara berkala untuk membantu mereka dalam menyusun Laporan Akuntabilitas yang sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa. Saat ini, sistem pencatatan keuangan desa mengandalkan akuntansi entri tunggal menggunakan *Microsoft Excel*, dengan jumlah personel yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi terbatas.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), Desa Jelbuk berpegang pada empat prinsip. *Pertama*, Prinsip Akuntabilitas diamati, karena Desa Jelbuk bertanggung jawab atas laporan RKPDDes dan APBDDes, yang merinci pendapatan, pengeluaran, program, dan kegiatan

⁵⁵ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017). 108

untuk tahun fiskal. *Kedua*, Asas Transparansi, Desa Jelbuk memiliki *website* yang dapat diakses oleh seluruh penduduk Desa Jelbuk. Terdapat baliho atau papan informasi pada halaman Kantor Desa Jelbuk agar masyarakat dapat mengetahui APBDes. *Ketiga*, Asas Partisipatif, di mana Desa Jelbuk mengundang tokoh masyarakat dan lembaga untuk turut berpartisipasi dalam menyusun RKPDes dan APBDes. *Keempat*, Asas Tertib dan Disiplin, di mana Desa Jelbuk mencatat semua anggaran masuk dan keluar setiap harinya pada buku kas umum dan buku kas pembantu, melakukan laporan pertanggungjawaban setiap satu tahun anggaran, dan melakukan evaluasi serta audit pada keuangan.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Jelbuk

Penerapan SAPDesa di Desa Jelbuk yang mencakup beberapa aspek seperti akuntabilitas, transparansi, penggunaan anggaran dan kepuasan masyarakat berjalan dengan baik. Meskipun ada tantangan seperti kesalahan pencatatan dan kurangnya pemahaman akuntansi. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis dan penggunaan teknologi informasi. Evaluasi mengungkapkan bahwa penerapan SAPDesa di Desa Jelbuk telah sangat meningkatkan pengelolaan keuangan dan tata kelola. Ini telah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengarah pada pemanfaatan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Penerapan SAPDesa tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam penerapan teori *Good Corporate Governance* pada Standar Akuntansi Pemerintahan Desa juga sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi. Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menghasilkan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut mencakup pihak internal, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, serta pihak eksternal, seperti investor, kreditur, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.⁵⁶ Prinsip *good corporate governance* mencakup lima hal yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat diadopsi dalam berbagai sektor melalui interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.⁵⁷

Transparansi berarti bahwa laporan keuangan desa harus disajikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Desa Jelbuk telah menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan akses informasi publik melalui berbagai media seperti internet, papan pengumuman, rapat desa, dan media lainnya agar masyarakat mengetahui

⁵⁶ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Jakarta Selatan: Norlive Kharisma Indonesia. 2016) h. 21.

⁵⁷ Enita Binawati, dan Junaidi Affan. "AKUNTABILITAS DANA DESA." (2022). h. 39.

bagaimana dana desa dikelola. Seperti rincian pengeluaran dana desa untuk infrastruktur jalan dan pembuatan saluran irigasi.

Akuntabilitas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Desa berusaha agar pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, dengan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan setiap aktivitas keuangan kepada pemerintah daerah. Kepala desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya harus menyampaikan laporan yang transparan terkait pengelolaan anggaran, program desa yang mendapatkan dana dari desa, dan hasil dari program yang dicapai. Dan akan dipertanggung jawabkan pada saat dilakukan pengauditan oleh pihak pemerintah.

Responsibilitas pemerintah desa harus mematuhi peraturan terkait pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa terkait dengan tujuan pembangunan desa. pemerintah desa harus memastikan penggunaan anggaran dana sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Seperti pembangunan irigasi yang memperhatikan dampak lingkungan dan memastikan bahwa proyek ini tidak merusak lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Independensi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan keuangan harus terbebas dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan, seperti tokoh masyarakat yang mungkin ingin memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Setiap keputusan

terkait alokasi anggaran dan program desa harus dilakukan secara obyektif dan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Seperti pemilihan bahan material proyek yang berkualitas bukan pada kenalan akrab salah satu pihak yang ada.

Keadilan dalam SAPDesa adalah semua warga desa berhak menikmati manfaat dari program-program yang dibiayai dana desa. pemerintah desa harus bersikap adil dalam memberikan pelayanan dana desa tanpa membeda-bedakan setiap masyarakat. Pemerintah desa harus mengatur program yang dapat bermanfaat bagi seluruh warga dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik atau ekonomi segelintir orang. Seperti program bantuan warga miskin yang kriteria penerimanya harus dipilih secara obyektif dan merata seperti kaum lansia, pengangguran, dan penyandang disabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang disajikan pada bab sebelumnya mengenai fokus penelitian, kesimpulan berikut dapat ditarik dengan menggunakan metode kualitatif:

1. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jelbuk menganut empat prinsip utama: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan disiplin anggaran.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Desa telah meningkat secara signifikan sejak adanya *workshop* akuntansi, menghasilkan catatan keuangan yang lebih terorganisir dan akurat serta kepatuhan terhadap standar pelaporan.

B. Saran

1. Bagi Perangkat Desa Jelbuk, ada baiknya jika tetap melakukan pengkajian lebih dalam mengenai akuntansi agar meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Meningkatkan digitalisasi terkait pencatatan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari kesalahan dalam pencatatan manual dan penyusunan laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Aulia Khoirunisa, Muhammad Arif, Juliana Nasution, “Peranan Pengelolaan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban dalam Pembelian Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Di Desa Bah Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun”, *ManBiz: Journal Of Management & Business*, Vol 3 No. 1 (2024). 91.
- Andi Siti Sri Hutami, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”. *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1 (2017).
- Anggi Lalita D. Salmon, Thobias E. D. Tomasowa, Rosdiana Mata. “Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima”. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Kupang*, Vol. 6 No. 2 (2021).
- Biduri, Sarwenda, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sidoarjo: Umsida Press. 2018).
- Binawati, Enita, dan Junaidi Affan. "AKUNTABILITAS DANA DESA." (2022).
- Binti Ayuning Tyas, Dyah Pravitasari, “Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Pembelian Ddana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung”, *Journal Of Economics And Policy Studies*, Vol. 2 No. 2 (2021).
- Dani Ranchman, Syifa Vidya Sofwan, Siska Amelia, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Survey Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Arjasari)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBA*, Vol. 14 No. 02 (2023).
- Daniel Kartika Adhi Dan Yohanes Suhardjo, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)”, *Jurnal STIE Semarang*, Vol 5 No. 3, (2013), 96.
- Domai, Tjahnulin, *Manajemen Keuangan Publik*, (Malang: UB Press, 2013).
- Fitriana, Ananda. “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menggali Potensi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books: 2015). 115.

Khalil Gibran, Syahril Jaddang, dan Muh. Ardiansyah, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, Vol.1 No. 3 (2021).

Manossoh, Hendrik *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Jakarta Selatan: Norlive Kharisma Indonesia, 2016).

M. Ridwan Tikollah, M. Yusuf A. Ngampo, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1 (2018).

Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, I Made Sudiartana, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem”, *Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 1 No. 2 (2021).

Nugrahani, Farida *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2015).

Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publisings, 2020).

Marlena, dan Muchamad Choirul Anam, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal of Accounting and Tax*, Vol 1 No. 2 (2022). 97.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [JDIH BPK RI]”

Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Winarna, “Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri”, *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 16 No. 1. (2016), 39.

Rauf, Rahyunir, dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing. 2015).

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

Sari, Santi Kartika. “Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bagsalsari Kabupaten Jember.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Senator Iven Budianto, Nur Ika Mauliyah “Pengaruh Tingkat Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kuliner Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”, *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA) 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun*, Vol 3, (2021).

Siregar, Baldric Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua) Edisi Kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017). 108.

Siti Fatimah Az-Zahra, Nurbati, Laylan Syafina, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa”, *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, Vol 9 No.1, (2023). 147.

“Standar Akuntansi Pemerintahan, - Komite Standar Akuntansi Pemerintahan”

“Standar Akuntansi Pemerintahan Desa – Komite Standar Akuntansi Pemerintahan”

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung:Alfabeta, 2019).

Tim Penyusun BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Jelbuk Dalam Angka, (Jember: Satria Utama, 2023).

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember, 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [JDIH BPK RI]

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”

Wilda, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol IV (2). 148.

Yungki Akbar, Hendra Harmain, Arnida Wahyuni Lubis, ‘Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dengan Investasi Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Tinjauan Islam (Studi Kasus Desa Ulumahuam)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2. (2023)

Wawancara :

Sujono, *wawancara*, Jember, 22 April 2024

Harumi Isnaini, *wawancara*, Jember 22 April 202

Samsul, *wawancara*, Jember, 13 Mei 2023

Moh. Hairur Rosi, *wawancara*, 13 Mei 2024

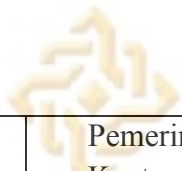
Nurul Apria Ningsih, *wawancara*, 9 Oktober 2024

Luluk Anggraeni, *wawancara*, 8 Oktober 2024



Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) Pada Kantor Desa Jelbuk Kabupaten Jember	1. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa	1. Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa 2. Laporan Keuangan 3. Asas Akuntansi	1. Informan : a. Bapak Sujono selaku Sekretaris Kantor Desa Jelbuk b. Ibu Harumi Isnaini selaku Bendahara Kantor Desa Jelbuk c. Bapak Samsul Selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Desa Jelbuk d. Bapak Moh.Hairur Rosi selaku Kepala Seksi	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian : a. Pendekatan Kualitatif b. Jenis Penelitian Deskriptif 2. Lokasi Penelitian : a. Jalan Raden Ajeng Kartini, Nomor 06, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. 3. Subjek Penelitian : <i>Purposive Sampling</i> 4. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	3. Bagaimana perencanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Jelbuk, Kabupaten Jember? 4. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Jelbuk, Kabupaten Jember?



			Pemerintahan Kantor Desa Jelbuk	5. Analisis Data : Deskriptif 6. Keabsahan Data : Triangulasi	
--	--	--	---------------------------------	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Alfin Desta Audyarizky Supriyono
NIM : 204105030112
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Judul Skripsi : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (Sapdesa) Pada Kantor Desa Jelbuk Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi saya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Jember, 10 September 2024
Saya yang menyatakan



Alfin Desta Audya. S
NIM. 204105030112

Rusun 10													136.611.400,000	
Rusun 11													136.611.400,000	
Rusun 12													136.611.400,000	
Rusun 2													136.611.400,000	
Rusun 3													136.611.400,000	
Rusun 4													136.611.400,000	
Rusun 5													136.611.400,000	
Rusun 6													136.611.400,000	
Rusun 7													136.611.400,000	
Rusun 8													136.611.400,000	
Rusun 9													136.611.400,000	
E	PENYATAAN													
1 - Saluran Pembiayaan														
1.1 - Saluran Pembiayaan Sosial														
1.1.1 - Bantuan Pembiayaan Sosial	Pembiayaan Modal B.20/Cas			70.000.000,000	Pembiayaan Modal			70.000.000,000			100,00 %			1.1.1.1
1.1.2 - Bantuan Pembiayaan Sosial														
1.1.3 - Bantuan Pembiayaan Sosial														
1.1.4 - Bantuan Pembiayaan Sosial														
1.1.5 - Bantuan Pembiayaan Sosial														
1.1.6 - Bantuan Pembiayaan Sosial														
1.1.7 - Bantuan Pembiayaan Sosial														
1.1.8 - Bantuan Pembiayaan Sosial														
1.1.9 - Bantuan Pembiayaan Sosial														
1.1.10 - Bantuan Pembiayaan Sosial														
Jumlah								136.611.400,000						
Penjelasan														
Realisasi (Bantuan + Pembiayaan Modal)				4.227.173.811										
Persentase Realisasi				98,99 %										
Persentase Capaian Output				97,99 %										

Disetujui oleh,
 Jelbuk, Juli 2023
KEPALA DESA JELBUK
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 HARIYONO
 JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Sekretaris Kantor Desa Jelbuk

1. Bagaimana tugas dan tanggung jawab Anda dalam penerapan SAPDesa di Desa Jelbuk?
2. Seberapa paham Anda tentang prinsip dan prosedur SAPDesa? Apakah ada pelatihan khusus yang Anda ikuti terkait hal ini?
3. Bagaimana proses penyusunan dan pelaporan keuangan desa dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan standar SAPDesa?
4. Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menyusun laporan keuangan desa sesuai dengan SAPDesa?
5. Bagaimana Anda memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun akurat dan transparan bagi masyarakat?

Bendahara Kantor Desa Jelbuk

6. Bagaimana peran Anda dalam penerapan SAPDesa di Desa Jelbuk, khususnya dalam hal pencatatan keuangan?
7. Apakah Anda merasa memiliki cukup pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan SAPDesa?
8. Bagaimana sistem pencatatan keuangan dilakukan di desa ini? Apakah menggunakan metode pencatatan manual atau digital (misalnya menggunakan Excel atau software akuntansi)?
9. Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan SAPDesa?
10. Bagaimana Anda memastikan bahwa pencatatan keuangan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai standar?

Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa Jelbuk

11. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran dilakukan di desa ini? Apakah proses tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip SAPDesa?
12. Seberapa sering Anda berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya (misalnya sekretaris desa dan bendahara) terkait pengelolaan keuangan desa?

13. Apa saja kebijakan atau regulasi yang Anda rasa perlu ditingkatkan untuk mendukung penerapan SAPDesa yang lebih efektif?
14. Bagaimana Anda melihat peran masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa?

Kepala Seksi Pelayanan Kantor Desa Jelbuk

15. Bagaimana Anda mendukung penerapan SAPDesa dalam pelayanan publik di Desa Jelbuk?
16. Apakah Anda merasa bahwa pelaksanaan program-program desa sudah sesuai dengan anggaran yang direncanakan? Bagaimana proses pemantauannya?
17. Bagaimana Anda bekerja sama dengan perangkat desa lain dalam memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan SAPDesa?
18. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan penerapan SAPDesa?
19. Bagaimana Anda memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk pelayanan publik di desa ini?

Tokoh Masyarakat Desa Jelbuk

20. Bagaimana pandangan Anda mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) di Desa Jelbuk? Apakah masyarakat sudah mendapatkan akses informasi terkait laporan keuangan desa?
21. Seberapa transparan menurut Anda pemerintah desa dalam menyampaikan laporan penggunaan dana desa kepada masyarakat? Apa media atau cara yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut?
22. Apakah Anda melihat adanya upaya dari pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat? Bagaimana proses pertanggungjawaban tersebut dilakukan?
23. Menurut Anda, apakah program-program yang didanai oleh dana desa sudah mendistribusikan manfaatnya secara adil kepada seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti kaum miskin atau penyandang disabilitas?

24. Bagaimana peran masyarakat dalam ikut serta mengawasi penggunaan dana desa? Apakah ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik terkait pengelolaan keuangan desa?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Malaram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-214/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

08 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Jelbuk
Jl. RA Kartini No. 06, Kec. Jelbuk, Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alfin Desta Audyarizky Supriyono
NIM : 204105030112
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



4.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JELBUK
DESA JELBUK

Jalan R.A Kartini Nomor : 006 Kode Pos 68192 Jelbuk. <http://jelbuk.desa.id>

SURAT - KETERANGAN
NOMOR : 470/24/35.09.25.2004/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sujono,S.Ag
Jabatan : Sekretaris Desa
Unit Kerja : Pemerintah Desa Jelbuk

Dengan ini menrangkan bahwa :








Nama / NIM : Alfin Desta Audyarizky Supriyono/204105030112
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Kampus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan Riset dengan Judul "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAPDesa) pada Kantor Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember" di Kantor Desa Jelbuk mulai 16 April 2024 – 28 Juni 2024.Riset tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Ijin Riset Nomor : B-2146/UN.22/7.a/PP.00.9/12/2023 Tanggal 08 Desember 2023.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	13 September 2023	Observasi tempat penelitian dan wawancara bersama Ibu Harumi	
2	08 Desember 2023	Menyerahkan surat izin untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Jelbuk	
3	22 April 2024	Wawancara bersama Bapak Sujono selaku Sekretaris Kantor Desa Jelbuk	
4	22 April 2024	Wawancara bersama Ibu Harumi Isnaini selaku Bendahara Kantor Desa Jelbuk	
5	13 Mei 2024	Wawancara bersama Bapak Samsul selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Desa Jelbuk	
6	13 Mei 2024	Wawancara bersama Bapak Moh. Hairur Rosi selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa Jelbuk	
7	28 Juni 2024	Penyerahan surat keterangan selesai penelitian	

DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Jelbuk



Foto wawancara dengan Ibu Harumi Isnaini selaku Bendahara Desa Jelbuk

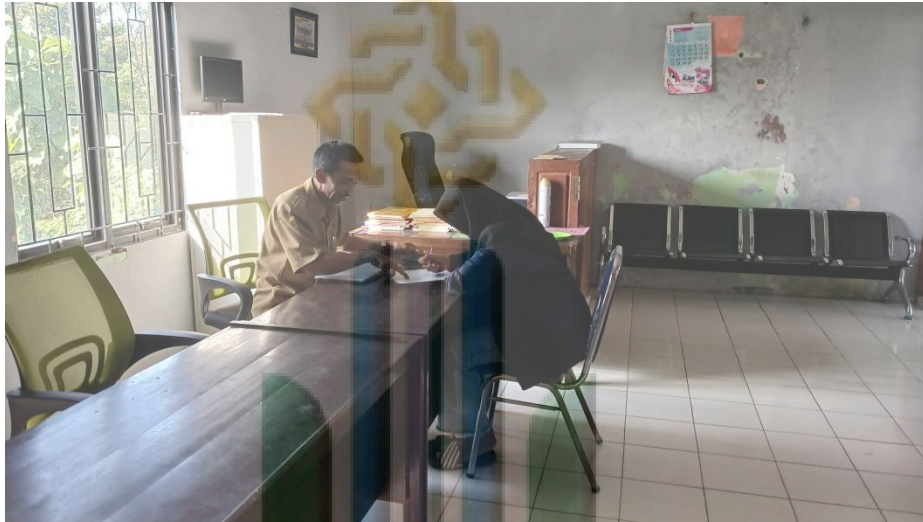


Foto wawancara dengan Bapak Samsul selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Jelbuk



Foto wawancara dengan Bapak Moh. Hairur Rosi selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jelbuk



Foto wawancara dengan Ibu Nurul Apria Ningsih selaku Kepala PKK Desa Jelbuk



Foto wawancara dengan Kader Posyandu Mawar 1 Desa Jelbuk



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Malaram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Petugas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Alfin Desta Audyarizky Supriyono
NIM : 204105030112
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (Sapdesa) Pada Kantor Desa Jelbuk Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

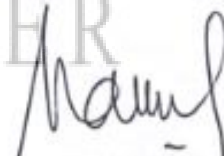
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Jember, 10 September 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


(Hj. MARIYAH ULFAH, M.E.I.)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68138 Telp: (0331) 487550
Fax: (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febuinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

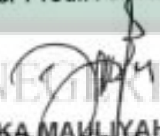
Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa

Nama : Alfin Desta Audyarlzky Supriyono
NIM : 204105030112
Semester : 9 (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 10 September 2024
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


Dr. NUR IKA MAULIYAH, M.Ak
NIP. 198803012018012001

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Alfin Desta Audyarizky Supriyono
NIM : 204105030112
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Alamat : Jl. RA Kartini Dusun Krajan Barat, RT 001 RW
002, Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk,
Kabupaten Jember

No. Handphone : 085796862512
Email : destaalvin84@gmail.com

Pendidikan Formal

TK : TK Dharma Wanita Jelbuk (2006-2008)
SD : SDN 01 Jelbuk (2008-2014)
SMP : SMPN 1 Jelbuk (2014-2017)
SMK : SMKN 1 Jember (2017-2020)